



KEPALA DESA SURENGEDE
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN KEPALA DESA SURENGEDE NOMOR 02 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SURENGEDE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan/penanganan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* serta Jaring Pengaman Sosial di Desa Surengede sesuai Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor : 140/055/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Percepatan Upaya Siaga Intensif *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Oleh Pemerintah Desa, maka perlu adanya pergeseran antar objek belanja dalam APBDesa Surengede Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 44 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Surengede Tahun Anggaran 2020
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

- tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
 15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
 16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
 17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
 18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
 19. Peraturan Desa No 06 Tahun 2019 tentang Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Surengede tahun anggaran 2020.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 2. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 3. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 2 April 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 Terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;

4. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 hal Penanggulangan Dampak COVID-19 di Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SURENGEDE TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.1.963.423.913,- (Satu miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga belas rupiah), bertambah/berkurang tetap Rp. 1.952.616.913,- (Satu miliar sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

| | |
|--|-----------------|
| Semula | Rp 38.000.000,- |
| a. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0,-</u> |
| Jumlah PADesa setelah <u>perubahan</u> | Rp 38.000.000,- |

1.2. Transfer

| | |
|--|------------------------|
| a. Semula | Rp 1.643.865.000,- |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 10.807.000,-</u> |
| Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan | Rp 1.109.298.000,- |

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

| | |
|--|-----------------|
| a. Semula | Rp 12.000.000,- |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp- 0,-</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan yang sah Setelah perubahan | Rp 12.000.000,- |

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp1.693.865.000,-

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

| | |
|--------------------------|------------------|
| a. Semula | Rp 479.114.000,- |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp-</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp 479.114.000,- |

2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

| | |
|--------------------------|--------------------|
| a. Semula | Rp 1.327.423.913,- |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp 304.739.913,- |
| Jumlah setelah perubahan | Rp 1.022.684.000,- |

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

| | |
|---|--------------------|
| a. Semula | Rp 129.386.000,- |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp 10.686.000,- |
| Jumlah setelah perubahan | Rp 118.700.000,- |
| 2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | |
| a. Semula | Rp 17.500.000,- |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp 0 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp 17.640.000,- |
| 2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa | |
| a. Semula | Rp- 10.000.000,- |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp 304.618.913,- |
| Jumlah setelah perubahan | Rp 314.618.913,- |
| Jumlah Belanja setelah perubahan | Rp 1.952.616.913,- |
| Surplus/(Defisit)setelah perubahan | Rp 269.558.913,- |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| 3.1. Penerimaan Pembiayaan | |
| a. Semula | Rp 269.558.913,- |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp- |
| Jumlah setelah perubahan | Rp 269.558.913,- |
| 3.2. Pengeluaran Pembiayaan | |
| a. Semula | Rp 0,- |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp - |
| Jumlah setelah perubahan | Rp 0,- |
| Selisih Pembiayaan setelah perubahan | Rp 269.558.913,- |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Surengede
Pada tanggal 9 Mei 2020

KEPALA DESA SURENGEDE



AKHMAD FAOZI, SE

Diundangkan di Surengede
Pada tanggal 9 Mei 2020

SEKRETARIS DESA SURENGEDE



ACHMAD MUFIDZ

BERITA DESA SURENGEDE TAHUN 2020 NOMOR 02